Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tentang Hukum Pernikahan Beda Agama Perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im Dan Ahmad Zahro)

Dio Alif Bawazier

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

alifbawazierdio@gmail.com

Abstrak :

Pernikahan beda agama di Indonesia adalah salah satu fenomena sosial yang menarik untuk dikaji, karena didalamnya termasuk pernikahan antara laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah menjadi isu yang selalu hidup dikalangan para ahli hukum dan pemerhati HAM serta menjadi titik konflik kepentingan antara agama dan HAM yang seringkali ditarik kedalam pembahasan hukum positif. Namun Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tidak mengatur pernikahan beda agama. Ahli hukum Islam juga tidak sepakat dalam menyatakan keharaman pernikahan ini. Oleh karena itu terdapat beberapa pemikiran yang menarik untuk dikaji dalam persoalan ini. Pemikiran tersebut berupa dasar-dasar interpretasi hukum dari Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro. Alasan keduanya dipilih dalam penelitian ini karena masing-masing tokoh tersebut merupakan ahli hukum kontemporer yang memiliki paradigma hukum progresif dan mencoba untuk menguraikan problematika umat dengan metode barunya berupa *nasakh* terbalik bagi An-Na'im dan *Istinbath manhaji* oleh Zahro. Fokus penelitian ini adalah dasar-dasar interpretasi hukum pernikahan laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah menurut Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan persamaan dan perbedaannya sehingga dapat diketahui landasan hukum yang melatari perbedaan pendapat dalam satu persoalan yang sama. Penelitian ini merupakan normatif, karena berhubungan dengan pencarian landasan hukum melalui pendekatan komparatif menggunakan data sekunder yang dikompilasikan melalui metode studi dokumen kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*. Kesimpulannya adalah pernikahan tersebut boleh dan sah dilakukan menurut Abdullah Ahmad An-Na'im, sedangkan Ahmad Zahro memandang pernikahan ini haram dan tidak sah serta tidak ditemukan titik persamaan antara Abdullah Ahmad An-Na'im dengan Ahmad Zahro dalam proses penetapan hukum pernikahan tersebut.

Kata Kunci : Pernikahan; Laki-laki non-Muslim; Perempuan Muslimah.

Pendahuluan

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia tidak tegas mengatur pernikahan beda agama. Secara umum pandangan ahli hukum mengenai ketegasan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 LN tahun 1974 No. 1 dalam konteks kawin beda agama ada tiga

pandangan. Pertama, pernikahan beda agama tidak ditolerir kebolehnya serta melanggar ayat (1) Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, serta huruf (f) pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Kedua, pernikahan antar agama tidak dilarang, valid dan mungkin dilaksanakan sebab telah masuk dalam cakupan kawin campuran, sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang tidak sama. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa Undang-undang perkawinan tidak mengatur persoalan nikah beda agama. Oleh karenanya, jika melihat pada Pasal 66 Undang-undang Perkawinan yang memberikan penekanan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini, maka peraturan-peraturan lama tidak dapat diberlakukan kembali. Namun karena Undang-undang Perkawinan belum mengaturnya maka perkawinan antaragama ini harus mendasarkan kepada peraturan perkawinan campur (PPC).¹ Dari hal ini dapat dipahami masih terjadi perbedaan pemahaman terhadap Undang-undang Perkawinan dalam pernikahan antar agama sehingga terjadi kekaburan hukum, padahal pernikahan ini telah nyata terjadi di Indonesia.

Pernikahan beda agama menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam pergaulan sosial masyarakat di Indonesia. Beberapa survei menyatakan jumlah pernikahan beda agama di Indonesia pada 2011 telah sampai 229 pasangan dan semenjak 2004 sampai 2012 telah sampai 1109 pasangan dengan rincian berurut dari yang paling banyak yaitu antara Islam dan Kristen, kemudian Islam dan Katolik, lalu Islam dan Hindu, dilanjutkan Islam dan Budha dan paling sedikit antara Kristen dan Budha. Sedangkan pernikahan beda agama yang paling intens terjadi berada di Jabodetabek dengan jumlah 174 keluarga.² Oleh karena itu, hal ini merupakan catatan bagi pemerintah agar segera memberikan solusi kepastian hukum yang selaras dengan fenomena sosial yang berlaku.

Pada sisi yang lain, hukum Islam juga menghadapi permasalahan internal. Permasalahan tersebut adalah Islam secara tegas melarang perkawinan antara pria non-Muslim dengan perempuan Muslim padahal fenomena pernikahan ini terus terjadi di Indonesia. Meski demikian, teks-teks hukum Islam dalam kapasitas penunjukan hukum tetap terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang pasti (*Qath'iyud dalalah*) dan hukum yang masih bersifat dugaan (*Dzonniyyud dalalah*).³ Mengacu pada hal tersebut maka hukum perkawinan ini relatif ada di antara keduanya.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti artikel Ilham Habibullah dan Syamsul Hadi Untung yang berjudul ‘Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Argumen Kaum Liberal’⁴ telah menjelaskan secara ringkas dan padat mengenai istinbath hukum kaum liberal yang sepertinya terbatas pada kaum Liberal Indonesia saja. Singkatnya, penelitian tersebut mengakui bahwa tokoh yang menjadi panutan kaum liberal

¹ Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 147-148.

² Admin Hidcom, “Sejak 2004-2011 Ada 1190 Pernikahan Beda Agama”, 31 Maret 2012, diakses tanggal 22 Mei 2018, <http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/03/31/58025/sejak-2004-2011-ada-1190-pernikahan-beda-agama>.html.

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), 33-34.

⁴ Ilham Habibullah dan Syamsul Hadi Untung, “Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Kaum Liberal,” *Kalimah*, no. 2 (2018): 220 <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v16i2.2874>.

Indonesia adalah Abdullah Ahmad An-Na'im namun penelitian tersebut tidak membahas secara rinci argumentasi Abdullah Ahmad An-Na'im mengenai pernikahan laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah. Sedangkan di dalam penelitian ini akan dibahas argumentasi hukum Abdullah Ahmad An-Naim tentang pernikahan tersebut kemudian dikomparasikan dengan pandangan Ahmad Zahro. Perbandingan kedua pandangan ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum dan pertimbangan yang mendasari perbedaan pandangan dalam persoalan yang sama. Berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk membongkar kesalahan penetapan hukum kaum liberal. Selain ini terdapat pula penelitian lain yang berjudul 'Pernikahan Muslim dengan Non-Muslim Menurut Al-Qur'an'⁵ oleh H. Muhammad Roihan Nasution yang membahas dua model pernikahan beda agama menurut al-Qur'an yaitu hukum menikahi perempuan ahli kitab dan *musyrik* tanpa membahas model pernikahan ketiga, laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini dari segi lapangan bahasan dan perspektif pandangan. Oleh karena beberapa penelitian sebelumnya tidak membahas pandangan Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro dalam menginterpretasikan hukum pernikahan ini, maka penelitian ini akan membahas pandangan keduanya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan normatif karena berhubungan dengan pencarian landasan hukum pernikahan laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah melalui pendekatan komparatif antara pandangan Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro yang bersumber dari data sekunder berupa buku-buku Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro yang dikompilasikan melalui metode studi dokumen yang merangkum poin-poin utama yang membahas persoalan tersebut, mengklasifikasi data-data tersebut kedalam tiga bagian yaitu dasar hukum, metode hukum dan produk hukumnya, kemudian melakukan pemeriksaan ulang data yang telah dikategorikan sebelumnya ke sumber-sumber utamanya, setelah itu menganalisisnya menggunakan teori-teori umum pernikahan dan interpretasi-interpretasi dasar hukum dari lima madzhab, dan memberikan kesimpulan berdasarkan analisis sebelumnya yang menghasilkan temuan berupa kesalahan An-Na'im dalam memahami dasar-dasar hukum madzhab-madzhab ulama' sebelumnya dan pengabaikan syarat-syarat sah pernikahan yang mempersyaratkan keislaman calon suami. Sedangkan Pandangan Zahro tidak sesuai klaimnya yang menyatakan bahwa penetapan hukumnya melalui metode *istinbat manhaji* dan kesesuaian alur pikir Zahro dengan ulama' klasik dalam syarat pernikahan.

Hukum Pernikahan Laki-laki Non-Muslim dengan Perempuan Muslimah Menurut Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro

Permasalahan hukum perkawinan antara pria non Muslim dengan wanita Muslim sejatinya adalah masalah yang telah disepakati ulama' maka seharusnya tidak dapat diijtihadkan atau diistinbathkan ulang. Hanya saja menurut Abdullah Ahmad an-Naim permasalahan ini belum final. Ia berpandangan, meskipun semua madzhab hukum Islam yang utama memiliki persamaan pandangan terhadap keharaman perkawinan pria non-Muslim dengan wanita Muslim akan tetapi argumentasi mereka tidak mendapatkan

⁵ H. Muhammad Roihan Nasution, "Pernikahan Muslim Dengan Non Muslim Menurut Al-Qur'an", *Al-Mufida*, no. 1 (2017): 52

<http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/download/84/79&ved>.

justifikasi langsung dari al-Qur'an bahkan hanya berupa argumen turunan dari surat an-Nisa' ayat 141.⁶ Padahal tidak semua madzhab utama menggunakan argumen tersebut. Itu hanya digunakan oleh ketiga madzhab besar yaitu Hanafi, Malik, dan Syafii sedangkan Hanbali menggunakan dasar hukum surat al-Mumtahanah ayat 10 dan surat al-Baqarah ayat 221.⁷ Implikasi dari pandangan ini adalah kemungkinan diajukan *istinbath* ulang atau *ijtihad* hukum sekali lagi dalam masalah tersebut.⁸

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa konsep *nasakh* yang menjadi tumpuan metode *ijtihad* an-Na'im adalah produk pemikiran Ustadz Mahmoud Mohamed Taha yang disebut sebagai pendekatan evolusi legislasi Islam. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan umat terhadap suatu inovasi baru yang diklaim sebagai satu-satunya jalan keluar bagi Islam dari kebuntuan pemahaman hukum Syari'ah.⁹

Salah satu persoalan hukum yang sedang mengalami kebuntuan adalah larangan perkawinan antara pria non-Muslim dengan wanita Muslim. Permasalahan ini menjadi serius karena menurut An-Na'im jawaban Syari'ah historis justru berbalik secara diametral dengan hak asasi manusia modern. Syariah historis dalam konteks ini melanggar hak asasi manusia dengan mendiskriminasi non-Muslim dan mendiskriminasi perempuan Muslimah sekaligus atau dengan kata lain melakukan diskriminasi berdasarkan agama dan jenis kelamin. Hal ini bukan berarti An-Na'im menilai HAM lebih berbobot daripada dogma-dogma namun hanya ingin menyelaraskan HAM dengan agama, yaitu dengan mempersempit implikasi solidaritas sosial keagamaan yang inheren dalam setiap agama, khususnya solidaritas primordial Muslim yang tidak harus berimplikasi pada status legal dan hak-hak rakyat sebagai warga negara, dalam konteks ini solidaritas kaum Muslim tidak harus membuat warga non-Muslim tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Langkah pertama An-Na'im sebelum menerapkan prinsip kontruksi evolusioner adalah menyelidiki alur pemikiran ulama' klasik. Alur pikir tersebut dibangun dari gabungan pelaksanaan perwalian pria, dalam konteks ini suami terhadap istrinya berdasarkan surat an-Nisa' ayat 34 dan non-Muslim terhadap orang Muslim berdasarkan surat an-Nisa' ayat 141.¹⁰ Padahal tidak ada satupun diantara empat madzhab utama yang menyusun formula gabungan antara ayat 34 surat an-Nisa' dengan ayat 141 surat an-Nisa' dalam penetapan hukum pernikahan antara pria non-Muslim dengan wanita Muslim. Akan tetapi masing-masing madzhab menggunakan surat al-Baqarah ayat 221, an-Nisa' ayat 141, dan ayat 10 surat al-Mumtahanah sebagai dasar hukum.¹¹

Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan kondisi terkini dari pria dan wanita modern yang memiliki potensi menyandang tanggung jawab dan kebebasan serta kelayakan menjalankan yang setara di depan hukum, yang menjamin keamanan dan

⁶Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), 292.

⁷ Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al Jamaili al-Maqdisi Ad-Dimasyqi al-Hanbali, *Al-Mughni libni Qudamah*, Juz 7 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 155.

⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, 292.

⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, 88.

¹⁰ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, 300.

¹¹ Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al Jamaili al-Maqdisi Ad-Dimasyqi al-Hanbali, *Al-Mughni libni Qudamah*, 155.

peluang ekonomi bagi semua masyarakat. Apabila laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam hukum maka ketergantungan itu tidak lagi ada, maka perwalian pria terhadap wanita menjadi tidak relevan, dalam konteks ini suami terhadap istrinya. Karena suami non-Muslim tidak akan pernah menjadi wali bagi istri Muslimnya, maka Syariah melarang pernikahan tersebut. Jika perwalian baik suami terhadap istrinya dan Muslim terhadap non-Muslim dihapus maka tidak akan lagi ada pembenaran pelarangan perkawinan antara pria non-Muslim dengan wanita Muslim.¹²

Penghapusan kedua perwalian tersebut memberikan konsekuensi keabsahan atas pernikahan tersebut, sehingga pernikahan tersebut boleh dilakukan dan sah berdasarkan hukum. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan hukum *wadh'iy* yang telah ditetapkan ulama' sebelumnya yang menetapkan salah satu syarat sah pernikahan bagi pria adalah keIslamannya.¹³ Jika pria tersebut non-Muslim maka ia masuk kedalam golongan orang-orang yang haram dinikahi untuk sementara. Artinya adalah apabila pria non-Muslim tersebut menjadi Muslim maka larangan menikah dengannya hilang.¹⁴

Dalam melakukan penghapusan larangan pernikahan ini An-Na'im menyatakan bahwa ia akan mengacu pada metode *nasakh* Taha yang mengilustrasikan penghapusan teks ayat abad tujuh dengan ayat *makkiyah* yang lebih relevan dengan situasi terkini. Akan tetapi ia tidak menjelaskan secara spesifik mengenai ayat *makkiyah* yang menghapus ayat 34 dan 141 surat an-Nisa' yang menjadi dasar larangan pernikahan ini. Mengenai hal ini terdapat argumen menarik yang dilontarkan An-Na'im ketika Ishtiaq Ahmed memintanya untuk mengurutkan sejumlah ayat-ayat Mekkah dan mempraktikkan penerapan metode yang diusulkan sebagai ilustrasi umum yang mendukung tesisnya secara menyeluruh. Maka An-Na'im menjawab bahwa ia mengusulkan metodologinya hanya untuk menjelaskan dan mengerucutkan suatu prinsip umum bagi interpretasi modern terhadap al-Qur'an, bukan berusaha mengaplikasikannya secara tuntas.¹⁵

Beralih menuju Istibath hukum Ahmad Zahro. Ia menyatakan bahwa pola istinbath yang akan digunakan adalah *manhaji*,¹⁶ yaitu melakukan penyelidikan dan mengikuti pendekatan istinbath hukum (*manhaj*) yang ditempuh oleh madzhab empat, Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali.¹⁷

Pemilihan pola ini bermula dari upaya mengubah pemahaman lama (stagnan) yang menganggap cukup pada produk-produk yang telah dibakukan oleh para ulama' sebelumnya dalam kitab-kitab empat madzhab, terlebih *Syafi'iyah* karena di Indonesia mayoritas bermadzhab Syafii.¹⁸ Di sisi lain, terdapat intervensi dari interaksi kultural yang semakin kompleks dan informasi global yang semakin cepat. Hal ini tentu harus

¹² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, 300.

¹³ Abul Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khalwati As-Shawi al-Maliki, *Bulghatus Salik li aqrabil masalik hasyiah as-Shawi alas Syarhis Shaghir*, Juz 2 (t. t.: Darul Maarif, t. th.), 374.

¹⁴ Muhammad Abdullatif Qindil, *Fiqhun nikah wa al-Faraidh* (t.t. : t. p. ,t. th), 126.

¹⁵ Tore Lindholm dan Karl Vogt (eds), *Islamic Law Reform And Human Rights Challenges And Rejoinders*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996), 119.

¹⁶ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Buku 1* (Jombang: Unipdu Press, 2016), 446.

¹⁷ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 168.

¹⁸ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*, 126-127.

diimbangi dengan langkah yang bersifat pencegahan agar pemahaman hukum Islam tidak berhenti dan terbelakang, bahkan ditinggalkan oleh umat.¹⁹

Langkah pertama Ahmad Zahro dalam menetapkan hukum perkawinan antara pria non-Muslim dengan perempuan Muslim adalah dengan mendasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 yang artinya :”...Dan janganlah kamu mengawinkan pria *musyrik* (dengan wanita-wanita beriman) sampai mereka beriman. Sungguh budak pria yang beriman lebih baik daripada pria *musyrik*, meskipun dia menarik hatimu....”²⁰ Dalam menggunakan ayat ini sebagai dasar hukum, Zahro menyatakan bahwa seluruh ulama' kompak menggunakan ayat ini sebagai dasar hukum wanita Muslim haram dikawinkan dengan pria non-Muslim mana pun juga, termasuk yang beragama Yahudi ataupun Nasrani (Katholik atau protestan).²¹

Pendapat Zahro yang menyatakan bahwa seluruh ulama' sepekat dalam memahami ayat tersebut sebagai dasar hukum larangan perkawinan antara pria non-Muslim dengan wanita Muslim memang sesuai dengan seluruh pendapat madzhab dalam lingkup madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali saja, sedangkan madzhab Maliki menggunakan dasar hukum surat an-Nisa ayat 141 sebagai dalil larangan pernikahan tersebut.²² Selain itu, madzhab Syi'ah yang diwakili oleh madzhab Imamiyah juga belum ditemukan proses *istinbath* hukumnya selain mendasarkan diri pada kesepakatan seluruh madzhab sebelumnya.²³

Langkah *istinbath* selanjutnya adalah mempertimbangkan kenyataan bahwa tidak ditemukan ayat lain yang dapat memberikan pemahaman sebagai pengecualian, sebagaimana surat al-Ma'idah ayat 5 yang “mengecualikan” wanita Ahli Kitab.²⁴ Ini menunjukkan bahwa Zahro berusaha mengaitkan hukum perkawinan tersebut dengan pernikahan pria Muslim dengan perempuan non-Muslim yang awalnya sama kemudian menjadi berbeda karena terdapat alasan pengecualian dari surat al-Ma'idah ayat 5. Selain itu, juga memperlihatkan bahwa ia sedang menyamakan dan menggolongkan Ahli Kitab ke dalam kelompok *musyrik*. Hal ini bertentangan dengan pendapat *Hanafiyah* yang mengistinbathkan hukum larangan pernikahan ini melalui ayat 221 surat al-Baqarah secara *qiyas*²⁵ karena ayat tersebut tidak secara *mansush* (eksplisit) menunjukkan larangan perkawinan antara pria Ahli Kitab dengan wanita Muslimah. Artinya adalah Ahli Kitab dan *musyrik* berbeda menurut golongan *Hanafiyah*.

Pertimbangan berikutnya adalah dalam Islam, nasab atau garis keturunan mengacu pada laki-laki atau suami. Akibatnya akan menjadi masalah psikologis-sosiologis jika ayah non-Muslim memiliki anak perempuan Islam, karena ia tidak berhak menjadi wali untuk anak perempuannya (meskipun dalam fiqh hal ini dapat diatasi dengan wali hakim).²⁶ Hal ini relevan dengan salah satu kemaslahatan manusia

¹⁹ Ahmad Zahro, “Desakralisasi Kitab Fiqih Sebagai Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam”, *Orasi Ilmiah*, disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Ilmu Fiqih (Hukum Islam), tanggal 30 Juli (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005), 1.

²⁰ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Buku 3* (Jombang: Unipdu Press, 2017), 270.

²¹ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Buku 3*, 270.

²² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Alisiy Abu Abdillah al-Maliki, *Minahul Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 291.

²³ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al-Fiqhu ala al-Madzahibil Khamsah* (Beirut: Dar at-Tayyar al-Jadid, 2000), 314.

²⁴ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Buku 3*, 270.

²⁵ Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasani Al-Hanafî, *Badai 'us Shana' I fi tartibis Syara' i*, Juz 2 (t. t. : Darul Kutub al-Ilmiah, 1986), 271-272.

²⁶ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Buku 1*, 191-192.

yang disebut *hifdzun nasl* yaitu memelihara kemaslahatan perkembangan keturunan agar tidak terjadi kekaburan silsilah.²⁷ Namun pertimbangan ini bukan pertimbangan untuk menetapkan hukum pernikahan tersebut, karena telah menetapkan asumsi yang mendahului yaitu pernikahan ini memang dilarang dan pertimbangan ini hanya sebagai penegeasan pelarangan itu. Selain itu, pertimbangan ini juga mengisyaratkan bahwa Zahro hanya mengambil pendapat ulama' saja atau *istinbath qauli* bukan *istinbath manhaji*.

Pertimbangan selanjutnya adalah dalam keluarga Islam, suami memiliki peran sebagai pucuk pimpinan bagi semua anggota keluarganya (istri dan anak-anak), sedangkan pimpinan itu wajib dipatuhi. Apabila pernikahan ini terjadi maka sangat sulit dihindarkan akibat buruk yang akan terjadi.²⁸ Oleh karena itu Syari'at mengharamkan pernikahan ini untuk menjaga kemaslahatan agama istri dan anak-anaknya. Islam sebagai agama mewajibkan upaya dakwah agama ini keseluruhan manusia.²⁹ Lalu bagaimana halnya jika pemimpin rumah tangga ini justru menyeru ke jalan sebaliknya sebagaimana ungkapan Allah mengenai orang-orang *musyrik* dalam surat al Baqarah ayat 221 "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita *musyrik*, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang *mu'min* lebih baik dari wanita *musyrik*, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang *musyrik* (dengan wanita-wanita *mu'min*) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang *mu'min* lebih baik dari orang *musyrik* walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". Ayat ini menjelaskan tentang larangan laki-laki muslim menikahi perempuan *musyrik* dan juga melarang pernikahan laki-laki *musyrik* dengan perempuan Muslimah. Kedua macam pernikahan ini dilarang karena bergaul dengan orang *musyrik* itu menjerumuskan pelakunya masuk ke dalam kekufuran sedangkan kekufuran pasti dibalas masuk neraka. Oleh karena itu pernikahan ini menjadi sarana menuju sesuatu yang haram dan sarana menuju yang haram itu juga haram.³⁰

Pertimbangan yang terakhir adalah sampai sekarang tidak satupun ulama' (termasuk Ibnu Jarir at-Thabari dan Syekh Muhammad Abduh) yang berpandangan bahwa yang dimaksud laki-laki *musyrik* hanyalah musyrik bangsa Arab saja, sebab tidak cukup *qarinah* atau indikator untuk dapat dipahami seperti itu.³¹ Dalam pertimbangan ini sebenarnya Ahmad Zahro berupaya menunjukkan bahwa tidak ada seorang ulama' pun yang berpendapat menghalalkan pernikahan jenis ini bahkan ulama'-ulama' yang dikenal sebagai ulama' kontemporer yang berpandangan fleksibel sekalipun dalam memberikan hukum.

Apabila pernikahan ini terjadi, maka menurut Ahmad Zahro hukumnya tidak sah dan haram. Akibatnya adalah status hukumnya sama dengan kumpul kebo dan persetubuhannya di anggap perzinaan.³² Alur pemikiran ini sesuai dengan pemikiran

²⁷ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 413.

²⁸ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Buku 1*, 192.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Al-Fiqh*, 200.

³⁰ Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasani Al-Hanafi, *Badai'us Shana'Ifi tartibis Syara'i*, 271.

³¹ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Buku 1*, 192.

³² Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Buku 1*, 192.

ulama' sebelumnya yang mensyaratkan suami harus beragama Islam agar pernikahannya sah.

Perbandingan *Istinbath* Hukum Abdullahi Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro Tentang Pernikahan Laki-laki Non-Muslim dengan Perempuan Muslimah

Dalam proses *istinbath* hukum perkawinan antara pria non-Muslim dengan perempuan Muslim oleh Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro tidak ditemukan persamaan namun hanya ditemukan perbedaan dalam berbagai aspeknya. Ini terjadi karena dalam berbagai aspek *istinbath* hukumnya selalu berbeda mulai dari dasar hukum, metode *istinbath* hukum sampai hasil akhirnya juga berbeda.

Secara garis besar perbedaan *istinbath* hukum Abdullah Ahmad An-Na'im dengan Ahmad Zahro dalam masalah perkawinan ini terletak pada definisi *ijtihad* atau *istinbath*, standarisasi kasus yang dapat di*ijtihad*i atau di*istinbath*kan, metode *ijtihad* atau *istinbath*, dasar hukum yang dijadikan dalil dan pertimbangan-pertimbangan hukum.

Perbedaan yang pertama adalah mengenai pendefinisian *ijtihad* atau *istinbath*. Menurut Abdullah Ahmad An-Na'im *ijtihad* adalah penggunaan penalaran hukum secara bebas untuk menghasilkan jawaban atas suatu permasalahan ketika al-Qur'an dan Sunnah mendiamkannya.³³ Sedangkan Ahmad Zahro tidak memakai istilah *ijtihad*, akan tetapi memakai istilah *istinbath* yang didefinisikan sebagai penggalian dan penetapan hukum dengan pendekatan *madzhabiy*.³⁴

Menurut An-Na'im, hukum perkawinan antara pria non-Muslim dengan wanita Muslim tidak mendapatkan justifikasi langsung dari al-Qur'an sehingga masuk dalam kategori dapat di*ijtihad*kan kembali.³⁵ Sedangkan Zahro tidak membatasi permasalahan yang menjadi lapangan *istinbath* dalam definisinya, akan tetapi dengan membatasi pendekatan *istinbath*nya pada madzhab empat memiliki implikasi seperti keharusan menerima produk hukum dari *nash* al-Qur'an dan Hadits yang *qath'i*, ataupun *ijma'* yang *kehujjahannya* seperti *nash* al-Qur'an dan Hadits *mutawatir* yang harus dijadikan panduan dalam arah *istinbath*nya. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan hukum yang diklaim Zahro sebagai metode *istinbath manhaji* menjadi gugur karena hukum pernikahan tersebut telah disepakati oleh ulama' sebelumnya dan persyaratan metodologisnya juga menekankan agar tidak dibantah dan di*ijtihad*kan kembali oleh generasi selanjutnya. Oleh karenanya, Zahro tidak dapat melakukan penetapan hukum kembali sebagai konsekuensi dari bermadzhab secara *manhaji* yang salah satu *manhajnya* adalah *ijma'*.

Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan metode *ijtihad* atau *istinbath*. An-Na'im menggunakan metode *nasakh* Mahmoud Mohammad Taha, yaitu metode *nasakh* terbalik. Isi metode *nasakh* tersebut adalah penghapusan teks untuk sementara waktu, dan ketika sampai pada waktu yang tepat, ia akan diberlakukan ulang. Maka ayat yang difungsikan ulang adalah ayat *muhkamat*, dan ayat yang pada abad tujuh dianggap *muhkamat*, sekarang diganti. Karena ayat-ayat pada abad ke tujuh adalah ayat-ayat *furu'* (turunan) dan kini berlaku ayat-ayat *ushul* (inti).³⁶ Sedangkan Ahmad Zahro

³³ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, 45.

³⁴ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*, 117.

³⁵ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Buku 1*, 292.

³⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, 89.

menggunakan metode pemahaman fiqih kontemporer, yaitu pemahaman fiqih melalui kolaborasi metode *istinbath manhaji*, pemahaman kontekstual dan *mashalih mursalah*, *mashalih al-aam*, dan *maqashid as-syari'ah*. Hal ini dapat diketahui dari ungkapan-ungkapan terpisah Ahmad Zahro yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam menerapkan metode *nasakh* terbalik, An-Na'im melakukan penelitian terhadap dasar-dasar hukum yang digunakan oleh seluruh madzhab utama. Larangan perkawinan antara pria non-Muslim dengan perempuan Muslim menurutnya didasarkan pada pelaksanaan perwalian pria sebagai suami terhadap istrinya berlandaskan surat an-Nisa' ayat 34 yang berisi alasan pria menjadi wali terhadap istrinya, yaitu akibat ketergantungan wanita kepada pria dalam ekonomi dan keamanan. Dasar ini kemudian dikombinasikan dengan peraturan tentang larangan non-Muslim menjadi wali seorang Muslim. Sehingga oleh karenanya, laki-laki non-Muslim tersebut tidak berhak menjadi wali perempuan Muslim berdasarkan ayat 141 surat an-Nisa'. Hal ini berarti Syariah melarang pernikahan tersebut.

Prinsip evolusioner Taha menghapus kedua tipe perwalian tersebut. Alasannya adalah ketergantungan perempuan kepada pria dalam bidang ekonomi dan keamanan tidak lagi ada. Akibatnya adalah perwalian pria atas wanita menjadi tidak relevan.³⁷ Apalagi pada masa sekarang terdapat asas hukum yang disebut *equality protection on the law*, yaitu hak perlindungan yang setara oleh hukum dan juga asas *equality justice under the law*, yaitu perlakuan yang setara di bawah hukum.³⁸

Berbeda dengan An-Na'im, Zahro menggunakan dasar hukum surat al-Baqarah ayat 221 yang artinya: "Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki *musyrik* (dengan perempuan-perempuan beriman) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki *musyrik* walaupun ia menarik hatimu.....".³⁹ Ahmad Zahro menemukan bahwa para ulama' bersepakat secara bulat memahami ayat tersebut sebagai dasar hukum larangan wanita Muslim menikah dengan pria non-Muslim mana saja, termasuk diharamkan pula menikah dengan pria yang beragama Yahudi maupun Nasrani (Katholik atau Protestan).⁴⁰ Kesepakatan seluruh ulama' ini yang kemudian disebut *ijma'* adalah salah satu metode penetapan hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan Hadits yang tidak dapat dijadikan arena perselisihan pendapat dan tidak dapat dijadikan obyek pembahasan *mujtahid* generasi setelahnya.⁴¹ Metode *ijma'* ini masih dalam lingkup metode *istinbath manhaji*.

Zahro juga menggunakan analisis *qowaid ushuliyah lughowiyah* yang menemukan bahwa tidak ada ayat lain yang memberikan suatu pengecualian sebagaimana surat al-Maidah ayat 5 yang mengecualikan perempuan Ahli Kitab dari cakupan ayat 221 al-Baqarah yang pada awalnya melarang pernikahan antara pria Muslim dengan wanita *musyrik*, termasuk perempuan Ahli Kitab. Kemudian dikecualikan atau di *takhsis* dengan surat al-Maidah ayat 5 yang memperbolehkan pernikahan pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab.

³⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, 299.

³⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 200.

³⁹ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer Buku 3*, 270.

⁴⁰ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer Buku 3*, 270.

⁴¹ Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Fath al-Ghaffar bi Syarhi al-Manar*, Juz 3 (t. t. : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1936), 5.

Pertimbangan selanjutnya adalah karena dalam Islam, nasab atau garis keturunan akan kembali pada laki-laki atau suami. Akibatnya adalah akan memicu ketegangan psikologis-sosiologis apabila ayah non-Muslim mempunyai anak perempuan Muslimah, sebab ia tidak berhak menjadi wali atas anak perempuannya (meskipun secara fiqih dapat diatasi dengan wali hakim).⁴² Namun pertimbangan ini bukan pertimbangan untuk menetapkan hukum pernikahan tersebut, karena telah menetapkan asumsi yang mendahului yaitu pernikahan ini memang dilarang dan pertimbangan ini hanya sebagai penegasan pelarangan itu. Selain itu, pertimbangan ini juga mengisyaratkan bahwa Zahro hanya mengambil pendapat ulama' saja atau *istinbath qauli* bukan *istinbath manhaji*.

Ahmad Zahro juga mempertimbangkan sebagaimana ahli hukum Islam klasik, bahwa seorang suami itu dijadikan pimpinan bagi semua anggota keluarganya (istri dan anak-anak), sedangkan pemimpin harus dipatuhi. Maka tidak dapat dibayangkan akibat-akibat yang akan timbul dan terjadi dari pernikahan ini terhadap religiusitas seluruh anggota keluarga, terutama terhadap anak dan istri.⁴³ Pertimbangan ini juga relevan dengan salah satu *maqashid syari'ah dhoruriyah* yaitu *hifdu ad-din*.

Pertimbangan terakhir adalah tidak satupun ditemukan pendapat ulama (termasuk Ibnu Jarir al-Thabari dan Syekh Muhammad Abduh) yang membatasi makna pria *musyrik* dalam ayat 221 surat al-Baqarah hanyalah yang berasal dari bangsa Arab saja, karena tidak ditemukan alasan atau *qarinah* yang menentukan pemahaman demikian.⁴⁴

Apabila pernikahan antara pria non-Muslim dengan wanita Muslim ini terjadi maka hukumnya tidak valid dan haram. Jika hukumnya tidak valid maka pernikahannya sama dengan kumpul kebo dan berstatus zina.⁴⁵

Kesimpulan

Abdullah Ahmad An-Naim dalam menetapkan hukum pernikahan laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah bermula dari pandangannya mengenai argumentasi ulama' klasik terhadap larangan pernikahan tersebut. Menurut mereka menggunakan argumentasi turunan dari surat an-Nisa' ayat 141 yang digabungkan dengan surat an-Nisa' ayat 34. Berdasarkan metode *nasakh* terbalik yang diwariskan gurunya, Thaha menjadikan surat an-Nisa' ayat 141 dan surat an-Nisa' ayat 34 dihapuskan. Penghapusan ini karena kandungan ayat tersebut tidak relevan dengan situasi dan kondisi modern yang menghargai manusia tanpa membedakan agama maupun gender. Akibatnya adalah penghapusan perkawinan antara pria non-Muslim dengan wanita Muslim. Hal ini berbeda sama sekali dengan *istinbath* Ahmad Zahro.

Ahmad Zahro menetapkan bahwa perkawinan antara pria non-Muslim dengan wanita Muslim dihukumi haram berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221 dan berdasarkan *ijma'* ulama mengenai keharaman pernikahan tersebut. Pendasaran pada ayat 221 surat al-Baqarah dan *ijma'* adalah termasuk pendekatan *manhaji* yang dikolaborasikan dengan beberapa pertimbangan *maqashid as-syari'ah* seperti *hifdu ad-din* dan *hifd an-nasl* serta analisis kaidah bahasa sehingga inilah yang menjadi isi pemahaman fiqih kontemporer Ahmad Zahro. Hal ini sangat berbeda dengan *istinbat* An-Na'im sebelumnya.

Perbedaan *istinbath* hukum Abdullah Ahmad An-Na'im dan Ahmad Zahro mengenai pernikahan laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah secara garis

⁴² Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer Buku 1*, 191- 192.

⁴³ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer Buku 1*, 192.

⁴⁴ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer Buku 1*, 192.

⁴⁵ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer Buku 1*, 192.

besar terletak pada definisi *ijtihad* atau *istinbath*, standarisasi kasus yang dapat di*ijtihad*i atau di*istinbath*kan, metode *ijtihad* atau *istinbath*, dasar hukum yang dijadikan dalil dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Sedangkan persamaannya tidak ditemukan sama sekali karena dari beberapa aspek dasar hukum atau pertimbangannya, metode *istinbat* atau *ijtihad* hukum dan produk hukumnya berbeda sama sekali.

Daftar Pustaka

- Berkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- al-Hanafi, Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasani. *Badai 'us Shana' I fi tartibis Syara' i*. Juz 2. t.t. : Darul Kutub al-Ilmiah, 1986.
- al-Hanafi, Ibnu Nujaim. *Fath al-Ghaffar bi Syarhi al-Manar*. Juz 3. t. t. : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1936.
- al-Hanbali, Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jamaili al-Maqdisi Ad-Dimasyqi. *Al-Mughni libni Qudamah*. Juz 7. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010.
- Lindholm, Tore dan Karl Vogt (eds). *Islamic Law Reform And Human Rights Challenges And Rejoinders*, terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS, 1996.
- al-Maliki, Abul Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khalwati As-Shawi. *Bulghatus Salik li aqrabil masalik hasyiah as-Shawi alas Syarhis Shaghir*. Juz 2. t. t.: Darul Maarif, t. th.
- al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Alisiyi Abu Abdillah. *Minahul Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Al-Fiqhu ala al-Madzahibil Khamsah*. Beirut: Dar at-Tayyar al-Jadid, 2000.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany. Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Qindil, Muhammad Abdullatif. *Fiqhun nikah wa al-Faraidh*. t.t. : t. p. , t. th.
- Zahro, Ahmad. "Desakralisasi Kitab Fiqih Sebagai Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam", *Orasi Ilmiah*, disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Ilmu Fiqih (Hukum Islam), tanggal 30 Juli. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005.
- Fiqh Kontemporer Buku 1*. Jombang: Unipdu Press, 2016.
- Fiqh Kontemporer Buku 3*. Jombang: Unipdu Press, 2017.
- Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Jurnal

- Habibullah, Ilham dan Syamsul Hadi Untung. "Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Kaum Liberal", *Kalimah*, no. 2 (2018) : 207-230,
<http://dx.doi.org/10.21111/klm.v16i2.2874>
- Nasution, H. Muhammad Roihan. "Pernikahan Muslim Dengan Non Muslim Menurut Al-Qur'an", *Al-Mufida*, no. 1 (2017) : 52-70
<http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/download/84/79&ved>

Website

Hidcom, Admin. "Sejak 2004-2011 Ada 1190 Pernikahan Beda Agama", 31 Maret 2012, diakses tanggal 22 Mei 2018,

<http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/03/31/58025/sejak-2004-2011-ada-1190-pernikahan-beda-agama.html>